

## **SEJARAH KEBANGKITAN DAN PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA**

**Mad Sobirin<sup>1</sup>, Andi Warisno<sup>2</sup>, Afif Ansori<sup>3</sup>, An An Andari<sup>4</sup>, Syahfriadi Syahfriadi<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam An Nur Lampung; Indonesia*

Email: [sobirin.khusairi@gmail.com](mailto:sobirin.khusairi@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to reveal the role of Muslims in the establishment of madrasah in Indonesia, as well as the broader struggle for spreading Islamic education in the country. The research method uses qualitative research that uses a historical, methodological approach. Historical research is the methodical examination of records and other sources that contain information about the answers to historians' prehistoric questions. The results show that although the origin of madrasah in Indonesia has been the subject of much speculation, determining exactly when the name of the madrasah was first mentioned as a place of Islamic studies in Indonesia is still difficult to understand. However, it cannot be denied that madrasah or Islamic religious schools have appeared in Indonesia since the early 20th century. The conclusion obtained is that a number of Islamic groups, including Muhammadiyah, NU, and others, emerged in the early 20th century, coinciding with the rise of madrasah as places of teaching in Indonesia. The Ministry of Religion, which was officially formed on 3 January 1946, had an important role in the growth of madrasah in the early years of independence. This organization vigorously defends the politics of Islamic education in Indonesia.

**Keywords:** Islamic Education; Madrasah; Ministry of Religion.

### **PENDAHULUAN**

Istilah “madrasah” berasal dari kata “darasa”, yang berarti “tempat duduk untuk belajar”. Kata “madrasah” dan “sekolah formal” telah melebur di Indonesia di bawah kendali Kementerian Agama. Ini tidak terjadi secara historis, sebaliknya. Madrasah merupakan tahap ketiga dan terakhir dalam sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam, setelah masjid kemudian yang kedua Masjid Khan atau masjid dengan dasar berasrama (Asari, 2017).

Menurut buku Maksum, Sejarah Madrasah dan Perkembangannya, madrasah adalah wadah atau lembaga yang memfasilitasi transmisi informasi seiring dengan pergeseran pendidikan Islam dari tatanan informal ke tatanan formal (Maksum, 1999). Charles Michael Stanton, seorang fisikawan, menulis dalam bukunya "Higher Learning in Islam: the Classical Period" bahwa doktrin Islam melahirkan dua bentuk berbeda dari lembaga pendidikan klasik: pendidikan formal dan pendidikan informal. Kata madrasah berasal dari kata Arab untuk "tempat berkumpul informal" dan menggambarkan transisi dari lingkungan belajar masjid yang tidak terstruktur ke pengaturan kelas yang lebih formal dari madrasah modern (Stanton, 2020).

Pada masa awal Islam, masjid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya lebih dari sekadar layanan keagamaan seperti shalat. Masjid berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial Muslim di samping tujuan utama shalat. Dengan demikian, selama tahun-tahun pembentukan Islam, “masyarakat Muslim pada waktu itu telah memperbesar tujuan masjid untuk digunakan sebagai lembaga pengajaran, gedung pengadilan, ruang pertemuan para pejuang, dan rumah untuk

menyambut para diplomat” (Maksum, 2019). Sebelum pendirian madrasah, fungsi-fungsi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat di masjid (Mulyono, 2017).

Rasul mulai membangun Masjid Nabawi sebagai salah satu tindakan pertamanya setelah dia dan murid-muridnya tiba di Madinah. Masjid ini sering digunakan oleh Ashhab al-shuffah, sekelompok teman dekat, untuk sholat (beribadah) dan belajar (Siswanto, 2019). Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam klasikal terus berkembang diberbagai wilayah lain di Indonesia (Azra, 2017).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Chairiyah, 2021). Di Indonesia, madrasah adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama. Madrasah saat ini dapat diidentifikasi sebagai lembaga pendidikan Islam modern berdasarkan tampilan luar dan standar keilmuannya, madrasah telah memiliki semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pengembangan keilmuan (proses pembelajaran), serta guru (mapelnya) yang berkualitas dan menguasai bidang studinya. Kurikulum madrasah harus mempertimbangkan tidak hanya misi lembaga yang dinyatakan tetapi juga tujuan siswanya. Kualitas unik dari setiap sekolah adalah cerminan dari potensi dan kekuatan masing-masing. Guru merencanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di madrasah. Hal ini meniscayakan madrasah sebagai sekolah yang bercirikan Islami memasukkan program-program keilmuan yang berkaitan dengan imtaq dan iptek dalam kurikulumnya, selain yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian, inisiatif, dan kepemimpinan. Senada dengan penelitian Chairiyah, (Muhlison, 2018) dalam tesisnya yang berjudul “Peran Madrasah Diniyah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Keagamaan Siswa (Studi Kasus Di Madrasah Diniyah Ali Adam Coper, Jetis, Ponorogo),” pendidikan keagamaan sangat penting dalam menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dan penyalahgunaannya, sehingga harus ditanamkan pendidikan keagamaan sejak dini mewujudkan perubahan dalam aspek kehidupan.

Dalam kaitannya dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan lebih detail membahas asal mula adanya madrasah sebagai sarana pendidikan pilihan bagi orang tua dalam memilih pendidikan untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu perkembangan madrasah sebagai pendidikan Islam harus lebih diperhatikan dan peran serta pemerintah dalam hal ini benar-benar diharapkan agar madrasah tetap menjadi pilihan pendidikan yang unggul (Haningsih, 2018).

Mengingat pentingnya peran madrasah dalam pendidikan nasional dan berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk meneliti Sejarah Perkembangan Madrasah dari awal mula munculnya sampai kepada keadaan sekarang yang mana madrasah menjadi salah satu sarana pendidikan unggulan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan metodologi sejarah. Penelitian sejarah adalah pemeriksaan secara metodis terhadap catatan-catatan dan sumber-sumber lain yang mengandung informasi tentang jawaban atas pertanyaan prasejarah para sejarawan, menurut (Gall et al., 2016). Sebaliknya, penelitian sejarah menurut Wiersman dalam (Djamal, 2015) dalam buku yang sama, merupakan proses menelaah secara kritis peristiwa-peristiwa masa lalu untuk menghasilkan gambaran dan interpretasi yang akurat dan benar atas peristiwa-peristiwa tersebut.

Data penelitian didapatkan dari penelitian Fu'ad al-Ahwani, 1955 tentang lembaga pendidikan Islam klasik, menurut buku Maksun, 1999 Sejarah Madrasah dan Perkembangannya, menurut Djaelani (2022) sebagaimana dikutip oleh (Maulidi, n.d.), Pelajaran agama di sekolah umum, yang sering dikenal dengan open baar orderwijs, baru terwujud di Indonesia setelah kekuasaan kolonial Belanda berakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dari data-data penelitian diskursus perkembangan madrasah di Indonesia secara sistematis untuk diproyeksikan pada analisis data. Berdasarkan konten analys/analisis isi, dilakukan menganalisis data-data penelitian perkembangan madrasah di Indonesia, mereduksi, menyajikannya, kemudian menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga pendidikan Islam yang terkenal dari masa klasik antara lain kuttab, masjid, dan madrasah. Beberapa di antaranya ada yang menyebut maktab, kuttab, al-jami', majlis atau majlis adab, dan madrasah, (Fu'ad al-Ahwani, 2015). Masjid telah digunakan sebagai tempat belajar sejak zaman Rasulullah. Belajar membaca dan mempelajari Al-Qur'an pada tingkat awal dimungkinkan di Kuttab, sebuah sekolah Islam dasar. Masjid Nabawi di Madinah berfungsi sebagai tempat belajar di samping banyak fungsi lainnya. Karena masjid selalu memainkan peran pendidikan yang penting, banyak masjid di dunia Islam merangkap sebagai sekolah.

Majelis ilmu atau disebut juga majelis adab merupakan tempat berkumpulnya langsung yang dipimpin oleh khalifah yang berasal dari zaman Umayyah dan berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Setelah masjid, pendirian besar berikutnya adalah madrasah, sebuah sekolah Islam. Proliferasi madrasah dapat ditelusuri sebagian karena fakta bahwa kepadatan masjid sebagai tempat belajar sangat mengganggu kegiatan shalat; selain itu, pengetahuan telah sangat maju dengan berlalunya waktu dan perkembangan peradaban manusia (Syalabi, 2013).

Seseorang tidak dapat melihat evolusi madrasah di Indonesia tanpa melihat juga evolusi ide-ide reformis dalam komunitas Muslim. Seperti telah disinggung sebelumnya, masuknya ide-ide pembaharuan membawa sejumlah pergeseran bagi umat Islam Indonesia pada pergantian

abad ke-20. Syekh Abdullah Ahmad adalah salah satu dari sekian banyak ulama yang berperan penting dalam mendirikan madrasah pertama di Indonesia. Pertama kali mendirikan masjid Adabiyah di Padang pada tahun 1909. Madrasah yang telah mengajarkan agama sejak tahun 1915 ini berganti nama menjadi HIS Adabiyah (Evers, 2012).

Pada tahun 1910, Syekh M. Thaib Umar membuka sebuah madrasah di kota Batu Sangkat. Baru pada tahun 1923 madrasah tersebut berganti nama dari madrasah menjadi sekolah diniyah, setelah ditutup tiga tahun sebelumnya. Madrasah Diniyah didirikan oleh Rangkyo Rahmah El Yunusiyah di Padang Panjang pada tahun yang sama. Seiring berjalannya waktu, madrasah diniyah ini berkembang di Indonesia, baik di dalam maupun di luar pesantren dan surau.

Dibidang organisasi, organisasi-organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah yang terkenal, didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan, juga aktif terlibat dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Muhammad Darwis Dahlan, putra K.H. Abu Bakar bin Kyai Sulaiman, lahir di Yogyakarta pada tahun 1869. Ia pertama kali mengunjungi Mekah pada tahun 1890 dan tinggal di sana selama satu tahun untuk menuntut ilmu, kemudian kembali pada tahun 1903 dan tinggal selama dua tahun lagi. Setelah menunaikan ibadah haji pertamanya, Dahlan mempraktekkan konsep pembaharuan sekembalinya dari Mekah (Noer, 2012).

Dengan fokusnya pada pendidikan, Muhammadiyah telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari sekian banyak organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial. Muhammadiyah membuat langkah besar di bidang pendidikan berkat penerapan sistem pendidikan mutakhir pada saat itu. Berikut ini dapat disampaikan tentang Muhammadiyah pada tahun 1925, hampir 13 tahun setelah berdirinya: 8 (delapan) Hollands Inlandse Schools; sekolah guru di Yogyakarta; 32 Sekolah Dasar Lima Tahun; sekolah Schakel; 14 madrasah; total 119 guru; dan 4000 siswa. Ada 852 cabang dan 898 kelompok (belum diakui sebagai cabang) pada tahun 1938, dengan total 250.000 anggota. Selain 1.774 sekolah, 31 perpustakaan umum, dan 834 mesjid, Ia juga memiliki program terobosan (Noer Aly, 2019).

Organisasi lainnya yaitu Al-Irsyad, bertugas mengawasi pendidikan umum dan agama, Al-Irsyad didirikan di Jakarta pada tahun 1913 dan mengoperasikan Madrasah Awaliyah (berlangsung tiga tahun), Madrasah Ibtidaiyah (berlangsung empat tahun), Madrasah Tajhiziyah (berlangsung dua tahun), Madrasah Muallimin (yang berlangsung empat tahun), dan Madrasah Takhasad.

Kemudian Pada tahun 1917, K.H. A. Halim mendirikan Persatuan Umat Islam Majalengka (PUI) di Jawa Barat. Orang tuanya yang religius melahirkannya di desa Cebereng Majalengka pada tahun 1887. Halim yang berusia 22 tahun, pergi ke Mekkah untuk menyelesaikan pendidikannya. Dalam Muktamar Persatuan Ulama di Majalengka tahun 1932, Halim mengusulkan pendirian

sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum, serta membekali para santri untuk pekerjaan tangan, perdagangan, dan pertanian sesuai dengan bakat masing-masing.

Asrama Santri dibangun sebagai institusi akademik untuk melaksanakan keputusan kongres. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi membentuk tiga tingkatan. Filosofi Halim tidak ingin seorang Muslim mengejar akhirat sambil mengabaikan dunia, terbukti dengan fakta bahwa siswa di sini belajar keterampilan praktis seperti pertanian dan pekerjaan tangan di samping pelajaran agama dan umum.

PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) didirikan pada tahun 1928 oleh Sulaiman Ar-Rassui, pemilik surau di Cdung; pada tahun 1942, diperkirakan terdapat 300 sekolah PERTI di seluruh Sumatera Barat, yang melayani 40.000 siswa (Steenbrink, 1986). Dan juga Atas prakarsa para pengajar dan santri di Perguruan Tinggi Islam Tapanuli, berdirilah organisasi Al-Jami'atul Washliyah di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, dan juga sangat aktif dalam dunia pendidikan. Tiga orang yang paling bertanggung jawab atas pendirian organisasi ini adalah Abdur Rahman Syahab, Udin Syamsuddin, dan Arsyad Thalib Lubis.

Yang juga berpengaruh terhadap pendidikan Islam di Sumatera Utara adalah kelompok yang dikenal dengan nama Al-Ittihadiyah. Didirikan pada tahun 1932, Al-Ittihadiyah adalah organisasi Islam yang, seperti organisasi lainnya, bergerak dalam aktivisme sosial. Sekolah SD, SMP, dan SMA banyak terdapat di Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan kabupaten lainnya.

K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdatul Ulama pada tahun 1926. Ia juga mendirikan sejumlah madrasah, antara lain Madrasah Awaliyah (selama dua tahun), Madrasah Ibtidaiyah (selama tiga tahun), Madrasah Tsanawiyah (selama tiga tahun), Madrasah Mu'allimin Wustha (selama tiga tahun), dan Madrasah Mu'alimin Ulya (tiga tahun), (Noer Aly, 2019).

Kemudian Sebuah kelompok Islam yang dikenal sebagai PERSIS didirikan pada tahun 1920-an di kota Bandung Jawa Barat. Anggota paling terkenal dari kelompok ini adalah Ahmad Hasan, yang lahir di Singapura pada tahun 1887 dari orang tua keturunan Indonesia dan India. Kemudian Mohammad Natsir, yang lahir tanggal 17 Juli 1908 di kota Alahan Panjang di Sumatera Barat. Sebagai akibat langsung dari inisiatif Natsir, sebuah lembaga pedagogis didirikan untuk mengawasi operasional taman kanak-kanak, HIS, MULO, dan sekolah untuk pendidik. Selain organisasi-organisasi tersebut di atas, pada bulan Maret 1936 didirikan sebuah pesantren di Bandung oleh PERSIS (Persatuan Islam). Setelah itu, pesantren dipindahkan ke Bangil.

### **Sejarah Madrasah dalam Islam**

Teladan nabi diikuti oleh khalifah dan pedagang (pengusaha) muslim, dengan pembangunan masjid dilanjutkan di wilayah muslim. Banyak masjid dapat ditemukan di setiap

kota karena pembangunannya tidak hanya didanai oleh pengusaha resmi tetapi juga oleh bangsawan, orang kaya, dan organisasi non pemerintah.

“Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dijumpai sejumlah tenaga pengajar yang secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid-masjid Kuffah, Basrah dan Damskus”. Fungsi ganda masjid sebagai tempat ibadah dan sekolah saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Tujuan utama masjid adalah religius, sedangkan tujuannya adalah pendidikan. Masjid secara tradisional adalah tempat ibadah, tetapi tidak jarang masjid juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Ada juga masjid yang mengambil nama dari syekh yang memimpin ibadah di sana. Beberapa dibangun dengan maksud bahwa seorang ulama tertentu suatu hari akan mengawasi program pendidikan masjid. Kita sering mendengar misalnya Masjid Abu Bakar Al-Syami, Masjid Al-Syafi'i, atau Masjid Al-Syamargani, yang semuanya adalah nama para ulama yang mengajar di sana (Asari, 2017).

Masjid Khan dengan masjid yang bersebelahan dengan asrama atau tempat menginap untuk tinggal santri selama belajar menjadi standar pada tahap kedua perkembangan pendidikan Islam. Sejumlah teori dan rencana menyerukan untuk mengubah masjid menjadi sekolah dan membangun asrama siswa di tempat tersebut. Beberapa contoh diberikan di bawah ini.

Pertama, perhatian utama adalah bahwa sekolah masjid mengalihkan perhatian dari tujuan utama masjid sebagai tempat ibadah. Kedua, meningkatnya permintaan akan pengetahuan ilmiah sebagai akibat langsung dari kemajuan ilmu pengetahuan. Sayangnya, banyak disiplin ilmu modern terlalu kompleks untuk diajarkan secara memadai di masjid. Ketiga, pendekatan baru muncul untuk menerapkan pendidikan. Beberapa pendidik sedang mempertimbangkan bagaimana mereka dapat menambah penghasilan mereka dengan pendidikan ekstrakurikuler. (Maksum, 2019).

Tidak seperti masjid tradisional, masjid khan ini memiliki asrama bagi siswa untuk tinggal selama mereka belajar di daerah tersebut. Khan dapat berarti hotel, motel, atau tempat penginapan lainnya. Menurut Maqdisi, dikutip oleh (Drajat, 2018) bahwa : “dalam sejarah kebudayaan Islam, khan bisa pula berarti bangunan yang berfungsi sebagai gudang atau pusat perdagangan dan ada pula khan yang secara finansial didukung oleh wakaf dan penghasilannya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial.”

Cara terbaik untuk memvisualisasikan "lembaga pendidikan masjid-khan" adalah sebagai asrama untuk santri. Kekhawatiran umat Islam terhadap ulama, terutama yang jauh dari posisi madrasah tempat dia mengajar, berkontribusi pada kebangkitan masjid-khan ini. Seorang siswa dari luar daerah harus mengurus supaya mendapatkan tempat untuk dirinya sendiri. Masjid-khan ini bisa memecahkan masalah dengan dibangun di sebelah masjid atau cukup dekat dengannya sehingga kedua struktur tersebut memberi kesan menjadi satu.

Madrasah yang dirancang sebagai sekolah dan lembaga pendidikan, dapat menjalankan fungsinya menjembatani kesenjangan antara masjid umum dan masjid khan yang didalamnya ada ruang kelas, asrama, dan mushola di madrasah. Lembaga pendidikan tinggi kini disebut sebagai “madrasah”, yang memiliki arti berbeda dengan apa yang secara tradisional dimaknai “madrasah” dalam konteks masyarakat Indonesia, yaitu sekolah dasar dan menengah (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah). Namun, madrasah tidak dapat dipertukarkan dengan universitas kontemporer. Sebagai mana yang dijelaskan (Asari, 2007) : “Ciri-ciri lembaga pendidikan ini (madrasah) tidak dapat dicocokkan secara persis dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada sekarang. Dan hal ini menimbulkan kesulitan besar dalam penerjemahan kata madrasah itu sendiri. Para peneliti sejarah pendidikan Islam yang menulis dalam bahasa-bahasa barat menerjemahkan kata madrasah secara bervariasi misalnya, *schule* atau *hochschule* (Jerman), *school*, *college* atau *academy* (Inggris).”

“Sekitar abad 11 dan 12 M (abad ke-5 dan 6 H), Wazir Seljuk, Nizam Al-Mulk, mendirikan Nizamiyah di Baghdad, menandai awal kebangkitan madrasah sebagai jenis lembaga pendidikan Islam yang berbeda di seluruh dunia Islam”, (Dawam et al., 2004). Sebuah sekolah dengan tujuan menyebarkan ideologi Sunni untuk melawan ideologi Syiah, merekrut dan mendistribusikan guru Sunni ke berbagai bagian negara, dan mengorganisir serikat buruh Sunni untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Maksum (1999: 60) mengutip Muhammad Abd Rahim Ghanimah dari karyanya Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Kubra untuk menunjukkan bahwa tidak semua orang setuju dengan gagasan bahwa madrasah pertama didirikan pada abad ke-5 Hijriah. Kata madrasah belum dijumpai pada sumber-sumber sejarah hingga kira-kira akhir abad ke-4 Hijriyah. Akan tetapi banyak bukti yang signifikan justru menunjukkan bahwa madrasah telah berdiri sejak abad ke-4 Hijriyah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur.

Sentimen ini digaungkan oleh (Asari, 2017), yang merujuk Ahmad Amin dari karyanya Dhuha 'Al-Islam, yang pada gilirannya mengutip Al-Dzahabi sebagai berikut : “Hal ini tidak bisa dipertahankan, sebab penelitian belakangan membuktikan bahwa bahkan sebelum berdirinya Dinasti Saljuq sekalipun madrasah telah dikenal secara luas di daerah Nisyapur yang di bawah naungan Dinasti Samaniyah (204-395H/819-1005M) berkembang menjadi salah satu pusat budaya dan pendidikan terbesar di dunia Islam sepanjang abad ke-4 H/10 M. Daerah yang terkenal sebagai tempat kelahiran madrasah ini telah memiliki banyak madrasah sebelum era Nizam Al-Mulk.” Meskipun demikian, pengaruh Madrasah Nizamiyah jauh lebih besar daripada madrasah-madrasah sebelumnya. Menurut Ahmad Syalabi yang dikutip dalam (Nahar & Syaokani, 2020), “Menjadikan pendirian Madrasah Nizamiyah sebagai pembatas untuk membedakannya dengan era pendidikan Islam sebelumnya.”

### **Perkembangan Madrasah di Indonesia**

Meskipun asal usul madrasah di Indonesia telah menjadi bahan banyak spekulasi, namun menentukan dengan tepat kapan nama madrasah pertama kali disebut sebagai tempat studi Islam di Indonesia masih sulit dipahami. Namun tidak dapat disangkal bahwa madrasah atau sekolah agama Islam telah muncul di Indonesia sejak awal abad ke-20.

Meskipun madrasah juga berkembang pada awal abad ke-20, pertumbuhannya di Barat tidak dapat dibandingkan dengan pertumbuhan di Timur Tengah. Telah dicatat bahwa "ilmu agama dan ilmu umum telah dimasukkan ke dalam pertumbuhan madrasah di Timur Tengah" (Maksum, 2019). Namun, istilah madrasah bukanlah bagian dari tradisi pendidikan yang ada di nusantara sebelum abad ke dua puluh. Sebaliknya, gelar itu diperuntukkan bagi lembaga-lembaga seperti masjid, pesantren, surau, langgar, dan tajug tempat pembacaan Alquran. Alih-alih menggunakan nilai berdasarkan kinerja siswa dalam kegiatan kelas, seperti yang umum di sekolah kontemporer, pendidik di sini mengevaluasi kemajuan siswa dengan meninjau materi yang telah ditugaskan untuk mereka baca.

Diduga bahwa kebangkitan kelompok Islam seperti Muhammadiyah dan NU pada abad ke-20 akan berkorelasi dengan perkembangan madrasah. Ada dua cara untuk melihatnya: pertama, Belanda secara konsisten menolak proposal dari Dewan Rakyat (Volksraad) untuk mengajar studi agama Islam di universitas negeri mereka, yang mengarah ke analisis kedua. Ordonansi Indische Staatsregeling, pasal 179 ayat 2, yang menyatakan bahwa "pengajaran universal adalah netral," telah diberlakukan di Belanda. Pelajaran agama di kelas dilarang menurut (Djaelani, 2022) sebagaimana dikutip oleh (Maulidi, n.d.). Pelajaran agama di sekolah umum, yang sering dikenal dengan open baar orderwijs, baru terwujud di Indonesia setelah kekuasaan kolonial Belanda berakhir. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk menciptakan jenis sekolah baru di luar kebijakan Belanda, yang lebih banyak mencurahkan waktu dan perhatiannya pada pelajaran agama Islam tetapi strukturnya berbeda dengan kurikulum PAI yang sering diajarkan di pondok pesantren dan lembaga sejenis. Sebuah madrasah paling tepat menggambarkan pendiriannya.

Banyak sumber tentang sejarah madrasah di Indonesia sepakat setidaknya dua penyebab penyebaran sekolah-sekolah ini di seluruh negeri. Salah satu alasannya, banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah dan Mesir membawa semangat pembaruan kembali ke Indonesia setelah pulang dari pendidikannya di luar negeri. Alasan kedua adalah sebagai respon terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Politik etis pemerintah bertentangan. Salah satu dari sedikit daerah di mana otoritas kolonial melakukan investasi adalah pendidikan, dan hanya untuk keuntungannya kolonial sendiri. Mereka cukup khawatir bahwa pendidikan yang lebih baik berdasarkan ide-ide Islam akan merugikan kepentingan kekuatan kolonial. Pemerintah kolonial pada awalnya bermaksud menggunakan "tradisi pendidikan" pribumi untuk memajukan



pendidikan dalam konteks politik etisnya, menurut A. Steenbrink, sebagaimana dikutip oleh (Maksum, 2019).

“Dalam membahas penelitian yang diperintahkan Gubernur Jenderal Fort van der Capellen 1819, seorang sarjana Belanda Brugmen menduga bahwa pemerintah akan menerapkan pendidikan yang berdasarkan pribumi murni, secara teratur sesuai dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dimungkinkan dengan alasan politik asosiasi Hindia Belanda. Tetapi hal ini dalam kenyataannya tidak terbukti.”

Namun, rencana ini tidak pernah terwujud karena kekhawatiran praktis tentang bagaimana menjalankan model pendidikan Islam yang berbeda secara signifikan dari norma pada saat itu. Pada akhirnya, pemerintah Hindia Belanda menetapkan kurikulum standar untuk sekolah-sekolah, terutama yang berafiliasi dengan missionaris (Maksum, 2019).

### **Madrasah di Era Kolonial**

Ketika orang Eropa pertama kali tiba di Nusantara, mereka menemukan bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam karena penyebaran agama Islam oleh para wali. Pada saat yang sama, komunitas Muslim bertanggung jawab untuk mengawasi bentuk-bentuk pendidikan lainnya, dengan penekanan pada pendidikan agama Islam. Jenis sekolah ini biasanya dimulai sebagai pesantren dan terletak di rumah seseorang, masjid, langgar, atau kanopi.

Seiring berjalannya waktu, para sultan memperhatikan pesantren ini dan tumbuh untuk melihatnya sebagai sesuatu yang sangat penting. *Last but not least*, ada pesantren lain yang mendapat bantuan khusus dari sultan. “Salah satu contohnya adalah Pondok Pesantren Tegalsari yang merupakan pemberian sultan kepada kyai yang dianggap telah banyak berjasa,” kata seorang sejarawan (Shaleh, 2014). Pelajar dari seluruh negeri menghadiri Pesantren Tegalsari, yang menjadi terkenal pada abad ke-18 dan tetap menjadi lembaga pesantren terkemuka sampai pergantian abad ke-19.

Pada tahun-tahun setelah 1671, ketika pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengambil alih Nusantara, mereka sebagian besar mengabaikan pesantren dan bentuk-bentuk pengajaran Islam lainnya. Namun, karena otoritas kolonial melihat meningkatnya permintaan akan pekerja terampil tingkat rendah, pemerintah kolonial juga mulai menerapkan sistem sekolah yang sangat diskriminatif, terutama jika menyangkut penduduk asli.

Sekolah Kelas Satu (Hollands Inlandsche Scholl/HIS) dan Sekolah Kelas Dua (Hollands Inlandsche Scholl/HIS) sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda bagi rakyat Indonesia dahulunya diperuntukkan bagi kaum bangsawan (Standard School). Lembaga-lembaga ini didirikan untuk melatih pegawai negeri masa depan dan pekerja komersial dan industri. Sekolah-sekolah ini dibangun sebagai kelanjutan dari program pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang sebelumnya hanya memberikan pendidikan kepada warga negara Belanda.

Karena berbagai alasan, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan sistem pendidikan umum dengan biaya yang wajar. Mereka yang sebelumnya terbatas pada pesantren dan bentuk pendidikan tradisional lainnya sekarang dapat memanfaatkan kesempatan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lembaga pendidikan tradisional merasa terancam dengan munculnya gerakan ini dan respon positif masyarakat yang diterimanya.

Otoritas Islam di Indonesia telah termotivasi untuk bereaksi terhadap pertumbuhan sekolah-sekolah yang didirikan Belanda dengan cepat dan disetujui secara luas di negara ini. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah Hindia Belanda menyediakan beberapa sumber pendidikan bagi penduduk asli, undang-undang yang diskriminatif diperkenalkan. Karena penjajah hanya mampu mendidik sampai derajat tertentu, strategi ini tidak akan meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia memegang keyakinan Islam, seperti mengejar keadilan dan kesetaraan untuk semua orang. Otoritas Islam pada saat itu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendidikan Islam dalam hal teknik, kurikulum, sumber daya, dan struktur sehingga dapat diterima secara luas di masyarakat dan bersaing dengan sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah, manajemen, administrasi, dan jargon kelembagaan lainnya. Belanda menaklukkan beberapa pulau di Indonesia.

Lebih jauh lagi, pemerintah Belanda tidak terlalu menerima perkembangan pendidikan Islam, memandangnya sia-sia untuk merespon dan memberikan kebijakan tertentu mengenai pendidikan Islam karena dipandang sebagai pendidikan moral agama yang memberikan motivasi spiritual dan mungkin dapat mengobarkan perlawanan terhadap kolonialisme.

Ini sangat dibantu oleh Pan-Islamis dan kebangkitan Islam di Timur Tengah dan Mesir. Beberapa dari siswa ini telah pindah ke Mekah dan Madinah dari Mesir asli mereka untuk menyelesaikan dua, empat, atau enam tahun studi Islam mereka. Mereka menekankan perlunya mempertimbangkan kembali metode pendidikan Islam. Di Padang, Sumatera, Syekh Abdullah Ahmad mendirikan Madrasah Adabiyah pada tahun 1908. Madrasah ini memperoleh nama HIS Adabiyah pada tahun 1915. Madrasah Shcoel di Batusangkar didirikan oleh Syekh M. Taib Umar pada tahun 1910, sedangkan H. Mahmud Yunus mendirikan Sekolah Diniyah pada tahun 1918.

Saadah Adabiyah adalah madrasah pertama yang didirikan di Aceh oleh Tengku Daud Beureuh pada tahun 1930-an. Ada banyak lembaga pendidikan Islam di wilayah Sumatera, seperti Madrasah Al-Muslim Tengku Abdul Rahman Munasah Mencap dan Madrasah Sarul Huda. Kejadian serupa juga terjadi di pulau-pulau lain diseluruh nusantara.

Banyak madrasah dan sekolah umum dengan berbagai gaya dan tingkat pendidikan Islam telah didirikan oleh kelompok-kelompok Islam.

1. MI, MTsM, Muallimin/Mu'allimat, Muballighin/Muballighat, dan MD didirikan oleh Muhammadiyah (1912);

2. Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin, dan Tahassis didirikan oleh Al-Irsyad (1913);
3. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Diniyah semuanya didirikan oleh Matlaul Anwar di Menes Banten;
4. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) mendirikan empat akademi Islam yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Kuliyyah Syariah pada tahun 1928.
5. Nahdhatul Ulama (1926) mendirikan lima madrasah berikut: Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya (Shaleh, 2014)

Pada masa kesultanan, madrasah menerima dana dan dukungan, dan beberapa bahkan didirikan atas nama sultan, memungkinkan mereka berkembang dan menghasilkan lulusan dan pemimpin yang kompeten. Meskipun demikian, pada masa penjajahan, madrasah digolongkan sebagai sekolah liar sesuai dengan tanggung jawab kolonialisme, dan pemerintah kolonial telah mengeluarkan peraturan yang membatasi bahkan mematikan sekolah swasta, termasuk madrasah.

Karena kekhawatiran meningkatnya radikalisme di kalangan Muslim terpelajar, pemerintah Hindia Belanda mengambil pendekatan represif terhadap pendidikan Islam. Pemerintah Belanda mendirikan organisasi khusus yang dikenal sebagai Priesterraden pada tahun 1882 untuk memantau lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam dan praktik keagamaan (Mughtarom, 2015). Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kebijakan yang disebut Pentahbisan Guru untuk mengawasi pengajaran Islam atas rekomendasi lembaga tersebut. Menurut undang-undang ini, semua penyuluh agama perlu mendapatkan izin khusus. Agar pendidikan agama rakyat tidak menjadi katalisator perlawanan terhadap penjajah, motivasi politik di balik Ordonansi Guru ini jelas.

Persyaratan bagi guru agama untuk meminta izin diubah dalam evolusi Ordonansi Guru menjadi persyaratan bahwa guru agama hanya melaporkan dan menginformasikan. Selain Ordonansi Guru, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932, yang memiliki wewenang untuk memusnahkan dan menutup sekolah-sekolah yang tidak memiliki izin atau mengajarkan mata pelajaran yang tidak disetujui oleh pemerintah. Untuk melaksanakan setiap perubahan cara penyelenggaraan sekolah, pemerintah harus memberikan persetujuannya, sebagaimana tercantum dalam klausul ini. Kurikulum dan fasilitas sekolah harus sering dilaporkan. Di beberapa daerah, sekolah dan pusat pembelajaran lainnya sering ditutup karena laporan terlambat diserahkan atau informasi yang diperlukan tidak ada.

Pada masa penjajahan Jepang, regulasi yang kurang kondusif mengenai pendidikan Islam tetap ada dengan beberapa revisi. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah kolonial Jepang

dipandang lebih baik karena memberikan kebebasan yang lebih besar daripada penjajah Belanda, tujuan utamanya di Indonesia adalah untuk meningkatkan otoritasnya sendiri.

Pemerintah Jepang mengembangkan program yang menyediakan dana untuk masjid dan lembaga pendidikan Islam seperti sekolah dan madrasah dalam upaya untuk memenangkan populasi Muslim. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan, mereka mengizinkan madrasah yang telah ditutup oleh kolonial Belanda untuk dibuka kembali. Meskipun demikian, pemerintah Jepang masih menyadari fakta bahwa madrasah-madrasah ini berpotensi mengorganisir perlawanan dengan kekerasan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia.

### **Madrasah di Masa Awal Kemerdekaan**

Sementara seluruh dunia berfokus pada revolusi fisik, Indonesia masih banyak berinvestasi pada pendidikan agama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan kelembagaan secara keseluruhan untuk pendidikan agama (Depdikbud). Alhasil, kedua kelompok tersebut berkolaborasi untuk menyusun peraturan tentang pengendalian pengajaran agama di sekolah umum (negeri dan swasta). Kementerian Pendidikan Agama bertugas memajukan pendidikan agama di sekolah-sekolah agama. Pada bulan Desember 1946, pemerintah secara resmi menetapkan pedoman untuk pengajaran Islam di sekolah umum. Sebelumnya, sekolah di setiap wilayah menawarkan pelajaran agama sebagai pengganti pendidikan karakter, sebuah praktik yang sudah ada sejak pendudukan Jepang (Subiyakto, 2019).

Kementerian Agama yang resmi dibentuk pada 3 Januari 1946 memiliki peran penting dalam pertumbuhan madrasah di tahun-tahun awal kemerdekaan. Organisasi ini berjuang keras untuk memastikan bahwa pendidikan Islam menjadi prioritas dalam politik Indonesia. Karena banyak Muslim berharap untuk melihat pengajaran agama diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah umum, Kementerian Agama memiliki kepentingan komersial dalam pendidikan Islam di samping dukungannya untuk madrasah. Secara khusus, tugas ini dikelola oleh departemen yang dikhususkan untuk pengajaran agama. Menurut salah satu dokumen, Bagian Pendidikan Departemen Agama bertanggung jawab atas tiga hal utama: (1) mengajar agama di sekolah negeri dan swasta, (2) mengajar mata pelajaran sekuler di sekolah berbasis agama, dan (3) mengajar guru agama (melalui Program Bimbingan Profesional dan Akreditasi).

Mengingat mandatnya, Kementerian Agama dapat dilihat sebagai advokat umat Islam untuk menyebarkan pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Departemen telah memantapkan dirinya sebagai pilar dalam kemajuan madrasah, dengan kekuatan politik untuk meningkatkan posisi madrasah dan menarik perhatian pembuat kebijakan. Kemenag sedang menajamkan pengembangan program untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pendidikan selain

melanjutkan kerja yang dicanangkan sejumlah individu seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyari, KH. Ilyas, Mahmud Yunus, dll.

Perintah sebelumnya melihat perluasan madrasah yang paling signifikan melalui penciptaan program-program seperti Pendidikan Hakim Agama Islam Negeri (PHIN) dan Pendidikan Guru Agama (PGA), (Maksum, 1999). Pendirian kedua madrasah ini dipuji sebagai peristiwa besar dalam sejarah Islam karena, pertama, akan melahirkan profesional yang akan bekerja untuk memajukan Islam dan, kedua, akan menghasilkan pendidik agama masa depan yang akan fokus pada pendidikan agama Islam. PGA didirikan oleh Kementerian Agama untuk menjamin keberlangsungan fungsi madrasah di Indonesia secara lebih strategis, meskipun asal-usulnya dapat dirunut ke masa sebelum kemerdekaan, khususnya di wilayah Minangkabau. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah sebagian besar akan digerakkan oleh para pendidik agama binaan PGA. Akibat melimpahnya tenaga pendidik berkualitas yang dihasilkan madrasah, maka penyebaran madrasah di Indonesia sudah terjamin.

“Sejarah terbentuknya PGA saat itu berawal dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Abdullah Sigit selaku penanggung jawab departemen pendidikan,” (Dawam et al., 2014) mengutip catatan Mahmud Yunus. Cabang ini mendirikan dua sekolah pada tahun 1950 yang disebut Sekolah Guru Islam dan Sekolah Tinggi Guru Islam, keduanya merupakan madrasah untuk guru profesional (SGAI). Program lima tahun penuh dirancang untuk siswa yang telah menyelesaikan SR/MI, sedangkan program akselerasi dua tahun dirancang untuk mereka yang telah menyelesaikan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Karena perkembangan baru, SGAI sekarang dikenal sebagai Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA), sedangkan SGHI sekarang dikenal sebagai Sekolah Guru Hakim Agama (SHGA).

### **Madrasah Saat ini**

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

### **KESIMPULAN**

Sejumlah kelompok Islam, termasuk Muhammadiyah, NU, dan lain-lain, muncul pada awal abad ke-20, bertepatan dengan kebangkitan madrasah sebagai tempat pengajaran di Indonesia. Kementerian Agama yang resmi dibentuk pada 3 Januari 1946 memiliki peran penting

dalam pertumbuhan madrasah di tahun-tahun awal kemerdekaan. Politik pendidikan Islam di Indonesia dibela dengan keras oleh organisasi ini. Wajar jika umat Islam yang diwakili oleh Kementerian Agama berlomba-lomba menjadikan pendidikan Islam sebagai norma di seluruh Indonesia. Kementerian Agama adalah tulang punggung yang, secara politis, dapat meningkatkan status madrasah ke titik di mana mereka mendapatkan perhatian besar di antara para pejabat pembuat kebijakan di Indonesia.

## **BIBLIOGRAFI**

- Asari, H. (2017). *Menyingkap zaman keemasan Islam: kajian atas lembaga-lembaga pendidikan*. Citapustaka.
- Abbas, St Aisyah & Nur Rahma Asnawi. (2020). "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Sumatera: Suatu Kajian terhadap Tokoh dan Lembaganya" in *ASH-SHAHABAH: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.6, No.1 [Januari], hlm.1-15.
- Abdullah. (2018). "Bahasa sebagai Konstruksi Budaya: Fenomena Bahasa Arab Indonesia". Tersedia secara online di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32436/1/Bahasa>
- Akhiruddin, K.M. (2015). "Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara" dalam *Jurnal TARBIYA*, Vol.1, No.1, hlm.195-219
- Amin, Faizal & Rifki Abror Ananda. (2018). "Kedatangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara: Tela'ah Teoritik tentang Proses Islamisasi Nusantara" dalam *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.18, No.2 [Desember], hlm.67-100.
- Andriani, Asna. (2015). "Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam" dalam *TA'ALLUM*, Vol.03, No.01 [Juni], hlm.39-56. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/67658-ID-urgensi-pembelajaran-bahasa-arab-dalam-p.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Februari 2019].
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 49–60.
- Dawam, A., Ta'arifin, A., & Durori, K. (2014). *Manajemen madrasah berbasis pesantren*. Lista Fariska Putra.
- Djamal, M. (2015). Paradigma penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Drajat, M. (2018). Sejarah Madrasah di Indonesia. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(1), 192–206
- Evers, H.-D. (2012). *Kemiskinan dan kebutuhan pokok*. Diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial [oleh] Rajawali.
- Fu'ad al-Ahwani, A. (2015). *Al-Tarbiyah al-Islamiyah aw al-Ta'lim fi Ray al-Qabisi*. *Cairo: Dar Ihyaal-Kutub Al-Arabiyah*.

- Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (2016). *Educational research: An introduction*. Longman Publishing.
- Haningsih, S. (2018). Peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah islam di Indonesia. *El-Tarbawi*, 1(1), 27-39.
- Maksum, M. S. (2019). *Perkembangannya* (Jakarta. Logos.
- Maulidi, F. (n.d.). *Model Kurikulum Pendidikan Agama islam di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pamulang*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muchtarom, Z. (2015). *Sejarah pendidikan islam*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Muhlison, A. Z. (2018). *Peran Madrasah Diniyah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Keagamaan Siswa (Studi Kasus Di Madrasah Diniyah Ali Adam Coper, Jetis, Ponorogo)* [IAIN Ponorogo]. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/2492/1/Afif Zakky Muhlison.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/2492/1/Afif%20Zakky%20Muhlison.pdf)
- Mulyono, M. (2017). Rekonstruksi Peran dan Fungsi Masjid sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Islam. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(01), 13-32.
- Nahar, S., & Syauckani, S. (2020). *Madrasah Laboratorium Di Indonesia (Kajian Perkembangan Madrasah Aliyah Laboratorium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dan UIN Sumatera Utara Medan)*.
- Noer Aly, H. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Noer, D. (2012). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. LP3ES= Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Shaleh, A. R. (2014). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*. RajaGrafindo Persada.
- Siswanto, I. E. (2012). *Masjid Nabawi, Wakaf Pertama Rasulullah*. Dompot Dhuafa. <https://zakat.or.id/wakaf-masjid-nabawi/>
- Stanton, C. M. (2020). *Higher learning in Islam: the classical period, AD 700-1300*. Rowman & Littlefield Pub Incorporated.
- Steenbrink, K. A. (2016). *Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun moderen*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Subiyakto, B. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi*.
- Syalabi, A. (1973). *Sejarah pendidikan Islam / Ahmad Syalabi* (M. S. L. Pent. Muhtar Yahya (ed.)). Bulan Bintang. [http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=7773](http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=7773)

